

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Kota Bekasi Genjot Penerimaan Pajak

Entitas / Cakupan : Kota Bekasi

Sumber / Hal : Kompas / Hal. 26

Edisi : Jumat, 14 September 2018

Kota Bekasi Genjot Penerimaan Pajak

BEKASI, KOMPAS — Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menggenjot penerimaan pajak untuk menghindari defisit Rp 300 miliar atau 5,17 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 senilai Rp 5,8 triliun. Aparat Pemkot Bekasi meminta lurah dan camat turun tangan menagih kewajiban pembayaran pajak warga.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Aan Suhanda menjelaskan, program itu tertuang dalam 21 langkah, salah satunya menggiatkan penagihan piutang Pajak Bumi Bangunan, hotel, restoran, reklame, parkir, air tanah, dan hiburan. "Kami berupaya mencapai target penda-

patan daerah," kata Aan, Kamis (13/9/2018), di Bekasi.

Penerimaan pendapatan daerah Kota Bekasi hingga 6 September 2018 mencapai Rp 2,92 triliun. Masih ada Rp 2,46 triliun untuk memenuhi target senilai Rp 5,38 triliun hingga akhir tahun anggaran 31 Desember 2018.

Adapun penerimaan pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), bagian dana perimbangan, dan bagian lain-lain yang sah. Dari tiga unsur itu, pencapaian paling kecil dari PAD, yaitu Rp 1,18 triliun atau 48,56 persen dari target Rp 2,43 triliun. Sementara dana perimbangan mencapai 70,38 persen

(Rp 1,18 triliun) dan bagian lain-lain yang sah 43,90 persen (Rp 560,37 miliar).

Aan mengklaim pengerahan camat dan lurah itu berujung positif. Hasilnya, hingga Kamis, realisasi penerimaan PBB dari 56 kelurahan dan 12 kecamatan mencapai 93 persen.

Sudah dikerjakan

Andi Widyo Suyono, Lurah Margahayu, mengatakan, tidak ada perintah khusus terkait penarikan pajak kepada warga. Andi berusaha menjalankan tugasnya mengingatkan warga agar membayar pajak. Menurut dia, hal itu penting karena Kota Bekasi tidak memiliki sumber daya alam yang

bisa diandalkan untuk modal pembangunan.

Tahun ini, jatuh tempo pembayaran PBB adalah 10 September 2018. Pencapaian pembayaran PBB tertinggi ada di Kelurahan Mustika Jaya, yaitu 102,88 persen. Adapun yang terendah adalah Kelurahan Sumur Batu, yaitu 80,90 persen.

Warsim Suryana, Lurah Cikiwul, mengakui penarikan pajak kerap terkendala. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian warga sedang terganggu. Kendala lain yang terjadi, kata Warsim, banyaknya wajib pajak yang tinggal di luar Kota Bekasi. Aparat kelurahan kesulitan menagih tunggakan pajak mereka. (NIA)